

## Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengadaan Sarana Prasarana (Di SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah)

Rida Ramadhani Ritonga<sup>1</sup>, Yusuf Hadijaya<sup>2</sup>, Zulkifli Tanjung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : [ramadanirida16@gmail.com](mailto:ramadanirida16@gmail.com)

**Abstract:** *This study generally aims to describe (1) how the principal's policy planning is in improving school facilities and infrastructure (2) how is the implementation of the principal's policy in improving school facilities and infrastructure (3) how is the evaluation of the principal's policy in improving facilities and school infrastructure. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The subjects in this study were students of the Al Hijrah Integrated Islamic Private Middle School, the madrasa head of the Al Hijrah Integrated Islamic Private Middle School, the teachers of the Al Hijrah Integrated Islamic Private Middle School, the KTU of the Al Hijrah Integrated Islamic Private Middle School and the student affairs department and curriculum of the Integrated Islamic Private Middle School. Al emigrated. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Data validation techniques with credibility, transferability, dependability and certainty. The results of this study indicate (1) Principal Policy Planning in Improving Learning Facilities and Infrastructure at SMPS IT AL HIJRAH, compiling a list of needs, estimating costs, compiling priority scales and preparing a procurement plan. (2) Implementation of the Principal's Policy in Improving Learning Facilities and Infrastructure at SMPS IT AL HIJRAH. Implementation of the principal's policy regarding facilities and infrastructure is the second step after planning in management, carrying out the procurement of facilities and infrastructure, distribution, utilization, maintenance. And (3) Evaluation of the Principal's Policy in Improving Facilities and Infrastructure and Learning Achievement at SMPS IT AL HIJRAH. a) The evaluation of facilities and infrastructure at SMPS IT AL HIJRAH is the responsibility of the principal and representatives of the facilities and infrastructure sector through supervision, b) input and processes, c) products and results of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Policy, Principal, Infrastructure*

**Abstrak:** Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bagaimana perencanaan kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan sarana dan prasarana di sekolah (2) Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah (3) Bagaimana evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah siswa-siswa SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah, Kepala madrasah SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah, Guru-guru SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah, KTU SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah dan bagian kemahasiswaan dan kurikulum SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Perencanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH, penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, penyusunan skala prioritas dan penyusunan rencana pengadaan. (2) Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH. Implementasi kebijakan kepala sekolah terkait sarana dan prasaran merupakan langkah kedua setelah perencanaan dalam manajemen, melakukan pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, pemenuhan, pemeliharaan. Dan (3) Evaluasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Prestasi Belajar SMPS IT AL HIJRAH. a) Evaluasi sarana dan prasarana di SMPS IT AL HIJRAH ditanggungjawab oleh kepala sekolah dan wakil bidang sarana dan prasarana melalui pengawasan, b) input dan proses, c) produk dan hasil sarana dan prasarana.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Kepala Sekolah, Sarana Prasarana

### PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan globalisasi menjadikan kebutuhan pendidikan baik sarana maupun prasarana . Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam setiap jenjang pendidikan menjadi salah satu sumber utama dalam

Received Juli 20, 2023; Revised Agustus 11, 2023; Acapted: September 02, 2023

\* Rida Ramadhani Ritonga, [ramadanirida16@gmail.com](mailto:ramadanirida16@gmail.com)

menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Setiap satuan pendidikan memfasilitasi peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik tersebut. Djam'an (Oktober 2013).

Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar pendidikan yang tertera pada PP No. 19 Tahun 2005 pasal 42. (Bamawi 2012) Pasal tersebut dijelaskan bahwa: Pertama setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya untuk menunjang kelengkapan sarana di sekolah, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, Kedua. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kerja, ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, ruang bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan penting yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan yang baik harus memiliki sarana dan prasarana memadai agar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Keberadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan berguna untuk penyelenggaraan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna, berkualitas serta menyenangkan. Hal tersebut sesuai penelitian yang menyebutkan bahwa pengadaan sarana prasarana merupakan faktor utama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran berdasarkan perencanaan yang tepat.

Namun sebaliknya, jika sarana dan prasarana kurang memadai maka proses belajar mengajarpun bisa terhambat. Menurut Filardo yang dikutip oleh Satori dan Irawan, sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Terkait pada motivasi, kesehatan, dan mental baik siswa ataupun guru. Selain itu, sarana dan prasarana yang tidak memadai akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, bahkan kurikulum tidak dapat berjalan. Sekolah di Indonesia, sarana dan prasarananya sebagian besar masih banyak yang memprihatinkan terutama di daerah terpencil. banyak ditemukan beberapa sekolah yang belum memenuhi standar nasional sarana dan prasarana seperti kelas yang bocor, kursi sekolah yang tidak layak pakai maupun belum lengkap, lapangan yang tergenang air,

buku di perpustakaan belum lengkap dan sebagainya.

Sebagaimana dalam penelitian Asnita dkk menyatakan bahwasanya ada beberapa ruangan kelas yang mengalami atap bocor selain itu, di ruang perpustakaan terdapat satu unit komputer yang rusak dan tidak langsung. Sekolah di Indonesia, sarana dan prasarananya sebagian besar masih banyak yang memprihatinkan terutama di daerah terpencil. banyak ditemukan beberapa sekolah yang belum memenuhi standar nasional sarana dan prasarana seperti kelas yang bocor, kursi sekolah yang tidak layak pakai maupun belum lengkap, lapangan yang tergenang air, buku di perpustakaan belum lengkap dan sebagainya. Djam'an (Oktober 2013) Dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu "Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengadaan Sarana dan Perasarana di SMP Swasta Islam Terpadu Al Hijrah JL. Perhubungan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH**

Menurut Nanang Fatah, terdapat tiga elemen kebijakan yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan (Arikunto, 2016).

Dalam ranah pendidikan kebijakan publik merupakan acuan sebagai pengelolaan dan pengembangan dalam lembaga pendidikan. Kepala Sekolah Kebijakan secara etimologi yakni "policy", dari bahasa Yunani "Polis" yang artinya kota (city) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok dalam usaha memilih untuk mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan persoalan. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kemahiran ataupun kepandaian, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam implementasi suatu pekerjaan.

Sementara itu menurut Riant Nugroho, kebijakan ialah suatu keputusan yang penyusunannya dibuat oleh suatu lembaga dan bersifat mengikat para pihak yang terkait

dengan lembaga tersebut. Adapun Nichols menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang sudah ditetapkan dan terprogram dengan aturan keputusan. E. Hugh Heelo mengungkapkan kebijakan ialah cara bertindak yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sedangkan menurut James E. Anderson ialah: A purpose a course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem of matter of concern.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai arah yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau beberapa orang dalam mengatasi sebuah masalah atau suatu permasalahan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Klein dan Murphy mengatakan bahwa kebijakan adalah “seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga, kebijakan pemimpin senantiasa harus berpedoman pemenuhan visi dan misi lembaga.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan ialah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengacu pada cara-cara atau tindakan untuk mengelola suatu kegiatan. (Syafaruddin, 2008). Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam standar nasional pendidikan agar mutu sekolah terkendali. perubahan kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201532 menyatakan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana ialah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat praktik, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (Teras, 2009).

## **B. MANAJEMEN SARANA PRASARANA**

Manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu bagian kajian dalam administrasi pendidikan sekolah , atau administrasi pendidikan dan sekaligus menjadi bidang garapan kepala sekolah selaku administrator sekolah. Sebagai salah satu bagian dalam kejian administrasi pendidikan ditinjau dari sisi bagaimana memberikan layanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana atau fasilitas kerja bagi personel sekolah. Dengan manajemen yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personel sekolah. Depdiknas telah membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, danperabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini,

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. (Nurasiah, Murniati Ar, 2015).

Manajemen sarana dan prasarana dapat di definisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan ini dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. (Arifin, 2012).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapih, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Manajemen sarana prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. (Ismaya, 2015).

### **C. TUJUAN MANAJEMEN SARANA PRASARANA**

Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan menurut (Kusnan, 2013) secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Sehingga melalui manajemen sarana dan prasarana yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi. sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efektif.

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.

Manajemen sarana prasarana sekolah itu terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara sistematis, prosesnya meliputi:

- a. Perencanaan, suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan- kegiatan atau program-program yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan perlengkapan atau fasilitas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan. Oleh karena itu suatu perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah tersebut dapat di nilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaanya itu dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan di sekolah dalam periode tertentu. Apabila pengadaan perlengkapan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhannya, berarti perencanaan pengadaan perlengkapan di sekolah itu betul-betul efektif. (Arikunto, 2016)
- b. Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah tersusun sebelumnya. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sentiana, 2018)
- c. Pendistribusian, barang-barang perlengkapan sekolah yang telah diadakan dapat didistribusikan. Pendistribusian perlengkapan sekolah adalah kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkannya
- d. Penggunaan dan Pemeliharaan Begitu barang-barang perlengkapan yang telah diadakan itu didistribusikan kepada bagian-bagian kelas, perpustakaan, laboratorium, tata usaha, atau proposal sekolah berarti barang-barang perlengkapan itu sudah berada dalam tanggung jawab bagian-bagian atau proposal sekolah tersebut. Atas perlimpahan itu pula bagian-bagian atau personel tersebut berhak memakainya untuk kepentingan proses pendidikan di sekolahnya.
- e. Inventarisasi  
Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah mencatat semua perlengkapan yang di miliki oleh sekolah. Lazimnya, kegiatan pencatatan semua perlengkapan pendidikan itu disebut dengan istilah inventarisasi perlengkapan pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

- f Penghapusan, Selama proses investaris kadang-kadang petugasnya menemukan barang-barang atau perlengkapan sekolah yang rusak berat. Barang-barang itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Seandainya diperbaiki, perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sehingga lebih baik membeli yang baru dari pada memperbaikinya.

#### **D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH**

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan sebaik mungkin termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajar. Tugas kepala sekolah membina atau mengembangkan sekolahnya sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Intinya kepala sekolah harus memahami setiap keadaan dengan apa yang dibutuhkan guru dan siswa.

Dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 jalan yang harus dilakukan yaitu pembinaan sarana dan prasarana administratif, pembinaan staf dalam kemampuan profesinya dan pembinaan diri sendiri dalam kepemimpinannya. Tugas utamanya kepala sekolah sebagai pemimpin ialah mengatur situasi, mengendalikan setiap kegiatan, organisasi atau lembaga dan menjadi juru bicara kelompok. (Anggi Eryzha, dkk., 2018)

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 pada pasal 12 ayat 1 bahwasanya kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembina tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola stakeholder sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang baik, sekaligus melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi para guru atau siswa sehingga termotivasi dalam mengelola kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2008, hal. 77). Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data berupa informasi lisan dan tulisan ataupun dokumentasi terkait judul penelitian.

## **Partisipan**

Adapun yang dijadikan subjek atau sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Subjek data primer, yaitu data utama dari siswa-siswa SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah. Subjek data sekunder yaitu data pelengkap sebagai pendukung dari penelitian ini yang diperoleh dari: Kepala madrasah SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah. Guru-guru SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah. KTU SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah Bagian kemahasiswaan dan kurikulum SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah

## **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. semua teknik tersebut peneliti lakukan secara bertahap untuk menemukan kesesuaian dari data-data yang telah peneliti kumpulkan.

## **Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data ini, peneliti mendeskripsikan dan menguraikan tentang kemampuan komunikasi persuasif guru dalam motivasi belajar siswa pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial di SMP Swasta Islam Terpadu Al hijrah. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama pengumpulan data, dan di rumuskan seperti: Analisis selama pengumpulan data. dalam tahap ini hal-hal yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : mencatat hal-hal yang penting yang menyangkut penelitian, seperti keadaan sekolah, siswa dan kelas, mengarahkan pertanyaan pada fokus penelitian, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atau lebih meluaskan pembahasan.

## **Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007, hal. 320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007, hal. 270).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH**

Setelah mendapatkan data dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan: SMPS IT AL HIJRAH

membuat analisis kebutuhan setiap tahun ajaran baru. Kepala sekolah membuat kebijakan terkait perencanaan, implementasi, pengadaan, pendistribusian, pemilihan, penghapusan dan evaluasi serta prestasi belajar siswa. Menentukan sarana dan prasarana apa yang akan diadakan setelah pengusulan setiap guru ketika rapat kerja.

Perencanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH merupakan konsep dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana yang sesuai standart nasional pendidikan dan kebutuhan guru-guru di sekolah.

Dalam perencanaan sarana dan prasarana sekolah ini mencakup beberapa hal, pertama perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan sekolah, kedua pengadaan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai anggaran dana tersedia, ketiga pemeliharaan serta sarana dan prasarana agar senantiasa dimanfaatkan, keempat pemeliharaan setelah dan sebelum selesai digunakan, kelima evaluasi dalam pengawasan sarana dan prasarana.

## **2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH**

Implementasi kebijakan kepala sekolah terkait sarana dan prasarana merupakan langkah kedua setelah perencanaan dalam manajemen. Kepala sekolah akan melakukan pengadaan setelah analisis kebutuhan bersama guru-guru. Kebijakan dalam proses pengadaannya dimana setiap guru mendapatkan hak pengusulan ide dan kepala sekolah memiliki kewajiban untuk mengadakan sarana dan prasarana apa yang akan diadakan.

Pengadaan sarana dan prasarana di SMPS IT AL HIJRAH yaitu dengan cara membeli dengan dana atau anggaran yang sudah ditetapkan. Dana pengadaan sarana dan prasarana yang didapat dari Yayasan dan dana BOS. Kebijakan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan juga telah disusun dalam implementasinya. Setiap guru wajib membuat laporan dalam memakai media visual dalam pembelajaran yang merupakan sarana tambahan pada kelas.

Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana di SMPS IT AL HIJRAH dilakukan oleh semua warga sekolah baik petugas khusus, kepala sekolah, guru, dan murid-murid yang lain bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Pemeliharaan sarana dan prasarana ada dua jenis yaitu pemeliharaan sehari-hari dan berkala. Pemeliharaan sehari-hari seperti membersihkan ruang kelas, ruang guru, dan Ruang Tata Usaha, sedangkan Pemeliharaan berkala seperti pemeliharaan berkala yaitu seperti pengecatan gedung dan kerusakan gedung lainnya. Pengawasan sarana dan prasarana di SMPS IT AL HIJRAH ditanggungjawab oleh kepala bidang sarana dan prasarana.

Implementasi sarana prasarana di SMPS IT AL HIJRAH melalui lima tahapan yaitu, pertama melakukan pengadaan sarana dan prasarana didasari oleh RKAS dan kebutuhan operasional setiap guru mata pelajaran, kedua pendistribusian mencakup distribusi anggaran dan distribusi sarana dan prasarana, ketiga pemakaian sarana dan prasarana memiliki kebijakan dan administrasi yang masih belum secara digital, keempat pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin, berkala dan insidental, dan kelima inventarisasi sekolah dilakukan setiap ada sarana dan prasarana baru disetiap tahun.

### **3. Evaluasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Prestasi Belajar Di SMPS IT AL-Hijrah**

Evaluasi sarana dan prasarana di SMPS IT AL-Hijrah ditanggungjawab oleh kepala sekolah dan wakil bidang sarana dan prasarana melalui pengawasan. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan agar penggunaan dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. Pengawasan dilakukan dalam setahun satu kali pada setiap tahun ajaran baru dengan cara mengumpulkan semua guru dan staf untuk melaporkan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Tahapan pengawasan SMPS IT AL HIJRAH dilakukan oleh tim evaluator setiap ajaran baru di akhir semester. Aspek yang dinilai dalam kegiatan evaluasi adalah kondisi riil sarana dan prasarana, frekuensi penggunaan serta tingkat kepuasan pengguna. Kemudian hasil evaluasi dibuat laporan dan akan dibahas dalam rapat kerja untuk segera dilakukan tindak lanjut.

## **KESIMPULAN**

Berpijak pada uraian di atas yang merupakan perpaduan antara hasil kajian teoritis dengan hasil penelitian di lapangan dan juga mengacu pada focus penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH, penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, penyusunan skala prioritas dan penyusunan rencana pengadaan.
2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran SMPS IT AL HIJRAH. Implementasi kebijakan kepala sekolah terkait sarana dan prasarana merupakan langkah kedua setelah perencanaan dalam manajemen, melakukan pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan.
3. Evaluasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Prestasi Belajar SMPS IT AL HIJRAH. a) Evaluasi sarana dan prasarana di SMPS IT AL

HIJRAH ditanggungjawab oleh kepala sekolah dan wakil bidang sarana dan prasarana melalui pengawasan, b) input dan proses, c) produk dan hasil sarana dan prasarana.

## **BIBLIOGRAHY**

- Arikunto, S. (2016) *Prosedur Penelitian ;Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Aufa (2016) ‘Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif Giriloyo II Bantul Yogyakarta’, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 1(2).
- Iskandar, M. dan (2009) *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press).
- Ismaya, B. (2015) *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lazaruth, S. (1984) *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong Lexy J. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, M.M. (2014) ‘Leadership Characteristics of Excelent Headmaster’, *Journal of Education and Practice*, 5(23).
- Mohammad Nurul Huda (2018) ‘OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA’, *Ta’dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, VI(2), pp. 51–69.
- Nurasiah, Murniati Ar, C.Z.H. (2015) ‘Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di Sd Negeri Ipeukan Bada Aceh Besar’, *Magister Administrasi Pendidikan*, 3(3).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. (2011). Bandung: Alfabeta.